PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKAKL) TAHUN 2019 DIPA 03

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

DASAR HUKUM

- Undang Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang Undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- PMK No. 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
- PMK No 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

DASAR HUKUM (lanjutan)

- PMK No.32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
- PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- KEPUTUSAN SEKMA NO. 10/SEK/SK/III/2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Penyelesaian Perkara Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum

ALOKASI ANGGARAN

Pagu 2019 :
Rp. 139.571.467.000

Dibandingkan dengan

Pagu 2018 : Rp. 152.581.761.000
(Penurunan sebesar Rp. 13.010.294.000)

Daerah :
Rp. 83.224.337.000

- *SBK Pidana Biasa : Rp. 57.011.690.000*
- *SBK Pidana Korupsi : Rp. 3.126.327.000*
- *SBK PHI : Rp. 3.041.214.000*
- *SBK Prodeo : Rp. 72.700.000*
- *Zitting Plaatz : Rp. 6.298.830.000*
- *Posbankum : Rp. 10.914.300.000*
- *Perikanan : Rp. 306.400.000*
- *Pengawasan Publik : Rp. 1.887.220.000*
- *Perjalanan Hakim Tipikor : Rp. 565.656.000*

Pusat : Rp. 56.347.130.000

FUNGSI SBK DALAM PERENCANAAN & PELAKSANAAN ANGGARAN

PERENCANAAN

Dalam tahapan perencanaan, SBK berfungsi sebagai BATAS TERTINGGI yang tidak dapat dilampaui

PELAKSANAAN ANGGARAN

Dalam tahapan pelaksanaan, SBK berfungsi sebagai ESTIMASI BIAYA RATA-RATA yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

SBK PENGADILAN TAHUN 2019

PENGADILAN TINGKAT BANDING

- SBK Penyelesaian Perkara Pidana
- SBK Penyelesaian Perkara Pidana Korupsi

PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

- SBK Penyelesaian Perkara Pidana
- SBK Penyelesaian Perkara Pidana Korupsi
- SBK Penyelesaian Perkara PHI
- SBK Pembebasan Biaya Perkara

SBK PENGADILAN TINGKAT BANDING TAHUN 2019

SBK Penyelesaian Perkara Pidana

- Pencatatan Register Perkara Banding
- Minutasi
- Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pengadilan Pengaju
- Pengiriman Surat Penahanan

SBK Penyelesaian Perkara Korupsi

- Pencatatan Register Perkara Banding
- Minutasi
- Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pengadilan Pengaju
- Pengiriman Surat Penahanan

SBK PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2019

SBK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

- Pendaftaran Berkas Perkara
- Penetapan Hari Sidang
- Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
- Minutasi/Upaya Hukum
- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa
- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan
- Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama
- Penangangan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama

SBK PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2019 (lanjutan)

SBK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KORUPSI

- Pendaftaran Berkas Perkara
- Penetapan Hari Sidang
- Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
- Minutasi/Upaya Hukum
- Pengiriman Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa
- Pengiriman Surat Penahanan /Perpanjangan Penahanan/Pemberitahuan Melalui Delegasi
- Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama
- Penangangan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama

SBK PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2019 (lanjutan)

SBK Penyelesaian Perkara PHI

- Pendaftaran Berkas Perkara
- Penetapan Majelis Hakim dan PP serta Penetapan Hari Sidang
- Pemeriksaan di sidang Pengadilan
- Minutasi/Upaya Hukum
- Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak
- Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tingkat Pertama
- Eksekusi Putusan Pengadilan

SBK PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2019 (lanjutan)

SBK Pembebasan Biaya Perkara

- Biaya Perkara
- Biaya Eksekusi

Pertanggungjawaban SBK

Biaya ATK
- Surat Perintah Kerja atau kontrak pengadaan barang dan jasa
- Bukti Pembelian berupa kuitansi, faktur atau nota penjualan

Biaya Penggandaan dan Penjilidan
- Bukti Pembelian berupa kuintansi, faktur atau nota penjualan

Biaya Pengiriman Pos
- Bukti atau Resi Pengiriman

Biaya Konsumsi
- Bukti Pembelian berupa kuintansi, faktur atau nota penjualan
- Bukti Pendistribusian Konsumsi

Biaya Perjalanan Dinas
- Surat Tugas
- Tiba Berangkat
- Kuitansi dan bukti pendukung lainnya

REALISASI ANGGARAN DIPA 03 TAHUN 2018
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANTEN
PER 14 SEPTEMBER 2018

SATKER	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
663399 PENGADILAN TINGGI BANTEN	359,106,000	109,876,790	30.60
099074 PENGADILAN NEGERI SERANG	892,578,000	440,360,650	49.34
099075 PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG	188,758,000	96,487,850	51.12
417845 PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	248,275,000	137,446,000	55.36
099077 PENGADILAN NEGERI TANGERANG	1,211,745,000	289,650,200	23.90
TOTAL	**2,900,462,000**	**1,073,821,490**	**37.02**

Beberapa Permasalahan Pelaksanaan DIPA 03

1. Masalah penjilidan berkas Perkara
2. Penggunaan ATK 01 dipakai untuk 03
3. Dalam penyusunan anggaran terlalu banyak target Perkara
4. Pelaksanaan Pos Bankum menggunakan sistem lelang dan termin pembayaran yang mengakibatkan baru dilaksanakan triwulan ke II
5. Pembayaran SPJ utk Penyampaian berkas ke kejaksaan atau ke para pihak tidak terpakai dikarenakan jaraknya dekat.
6. Pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan sering tidak terpakai karena kendala sapras dan kondisi cuaca
7. Perkara Prodeo tidak bisa dicairkan dikarenakan tidak adanya permintaan dari para pihak
8. Penyesuaian antara target perkara dan realisasi anggaran tidak sesuai .
9. Kurang koordinasi antara bagian Teknis dan Sekretariat

KONTAK PERSON
(PERENCANAAN PROGRAM DAN PENYUSUNAN ANGGARAN DITJEN BADILUM)

- K. Arry Soelaksono, SE, SH, M. Hum : 0816 1904 240
- Nopinus Andreas Purba, SE : 0813 1600 6244
- Ratna Sari, SH : 0812 9563 536
- Imron Syabana, SH, MM : 0856 9341 0990
- IB. Swardana Putra, S.Kom : 0822 9909 7899
- Email : anggaranbadilum@gmail.com

thank you
danke
謝謝
ngiyabonga
teşekkür ederim
gracias
спасибо
bedankt
dziękuję
obrigado
merci
mochchakkeram
go raibh maith agat
sukriya
kop khun krap
grazie
arigatō
takk
dakujem
merci
terima kasih
감사합니다
ありがとう
спасибо
хвала
tapadh leat
hvala
mauruuru
sagolun
taiku
рахмат
Баярлалаа
dank je
barka
wetalin
tack
mersi
blagodaram
matondo
paldies
grazzi
mahalo
faafetai lava
kiitos
dankie
dhanyavad
nandri
nanni
bayarlalaa
gracie
enkosi
koszönöm
akuo
dankon
djiere dieuf
tau
дякую
mamnun
murakoze
asante
manana
tenki
obrigada
chnorakaloutioun
gracias ago
gracies
sulpay
sobodi
dékuji
mesi
didi madloba
najis tuke
kam sah hamnida
rahmat
তোমাকে ধন্যবাদ
rahmet
diolch
dhanyavadagalu
shukriya
merce
мерси
trugarez
xiexie
ευχαριστώ